

**PRODUKSI RAMBUT PALSU MENURUT PENDAPAT TOKOH
NU (NAHDLATUL ULAMA') WARU SIDOARJO
(Studi Analisis Hukum Islam)**

SKRIPSI

Oleh:

Novi Zubaidah
NIM: C02205110



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2010**

**PRODUKSI RAMBUT PALSU MENURUT PENDAPAT TOKOH
NU (NAHDLATUL ULAMA') WARU SIDOARJO
(Studi Analisis Hukum Islam)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah**

Oleh:

Novi Zubaidah
NIM: C02205110

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

SURABAYA

**PRODUKSI RAMBUT PALSU MENURUT PENDAPAT TOKOH
NU (NAHDLATUL ULAMA') WARU SIDOARJO
(Studi Analisis Hukum Islam)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah**

Oleh:

Novi Zubaidah
NIM: C02205110



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

SURABAYA

GADJAHBELANG
8439407-5953789

**PRODUKSI RAMBUT PALSU MENURUT PENDAPAT TOKOH
NU (NAHDLATUL ULAMA') WARU SIDOARJO
(Studi Analisis Hukum Islam)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah**

Oleh:

**Novi Zubaidah
NIM: C02205110**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

SURABAYA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Novi Zubaidah
NIM : C02205110
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah
Institut : Program S1 IAIN sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul *“PRODUKSI RAMBUT PALSU MENURUT PENDAPAT TOKOH NU (NAHDLATUL ULAMA) WARU SIDOARJO (Studi Analisis Hukum Islam)”* adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya. kecuali yang telah ada rujukannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 22 Pebruari 2010

Saya yang menyatakan



Novi Zubaidah
NIM. C02205110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Novi Zubaidah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Februari 2010

Pembimbing,



Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.

NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Novi Zubaidah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal, 3 Maret 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

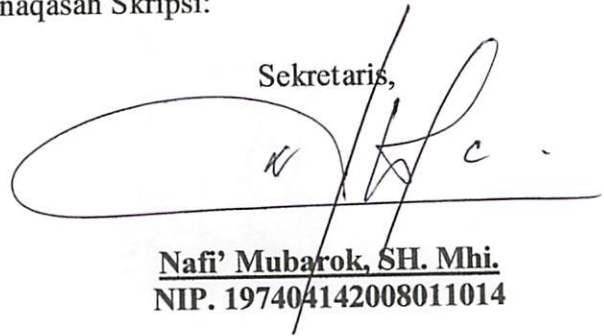
Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



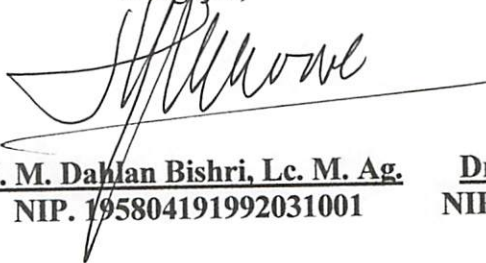
Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag.
NIP. 196506151991021001

Sekretaris,



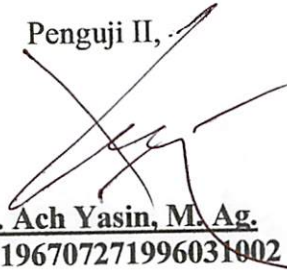
Nafi' Mubarak, SH. Mhi.
NIP. 197404142008011014

Penguji I,



H. M. Dahlan Bishri, Lc. M. Ag.
NIP. 195804191992031001

Penguji II,



Drs. Ach Yasin, M. Ag.
NIP. 196707271996031002

Pembimbing,



H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M. Ag.
NIP. 197306042000031005

Surabaya, 15 Maret 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

2. Produksi Rambut Palsu : kegiatan menghasilkan barang yang berupa Rambut tiruan atau (rambut buatan) sebagai penutup kepala atau hiasan rambut.⁸
3. NU (Nahdlatul Ulama) Waru Sidoarjo : Adalah suatu *jam'iyah diniyyah Islāmiyyah* (organisasi keagamaan Islam) yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M berakidah Islam menurut *ahlussunnah wal jama'ah*.⁹ Merupakan salah satu MWC yang berada di kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.
4. Tokoh NU : Adalah orang yang berperan dalam NU, baik kultural maupun struktural.
5. Studi Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk memenuhi keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁰
6. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Quran, Al-Ḥadīṣ, dan ketentuan para imam madzhab dan ulama' fiqih.

⁸ www.bahtera.org. Diakses tanggal 18 Januari 2010.

⁹ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, Cet.1, 2004) h. 15.

¹⁰ DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 32.

BAB II

PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM MEMAKAI RAMBUT PALSU

A. Pengertian Produksi

Produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya memang saling mempengaruhi, namun produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan tersebut. Tidak ada distribusi tanpa produksi, sedangkan kegiatan produksi merupakan respon terhadap kegiatan konsumsi atau sebaliknya. Produksi adalah menciptakan manfaat atas sesuatu benda. Produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya, meskipun mencari keuntungan tidak dilarang.

Kata produksi merupakan kata serapan dari “*production*” yang secara linguistic mengandung arti penghasilan. Menurut Richard G. Lips produksi didefinisikan sebagai tindakan dalam membuat komoditi barang-barang maupun jasa. Dalam literature ekonomi Islam padanan produksi adalah “*intāj*” () dari akar kata “*nataja*” ()¹.

¹ Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta : Megistra Insania Press 2003) h. 11-12.

Dengan pengertian yang luas tersebut kita memahami bahwa kegiatan produksi tidak terlepas dari keseharian manusia. Meskipun demikian, pembahasan tentang produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa memaksimalkan keuntungan sebagai motif utama meskipun banyak memiliki motif lain dari hanya sekedar maksimalkan keuntungan.

Upaya memaksimalkan keuntungan itu membuat sistem ekonomi konvensional sangat mendewakan produktivitas dan efisiensi ketika berproduksi, sikap ini sering membuat mereka mengabaikan masalah-masalah eksternalitas atau dampak merugikan dari produk yang dibuat.

Dalam ekonomi Islam terdapat keyakinan adanya Allah SWT sehingga peran dan kepemilikan dalam ekonomi dipegang oleh Allah, maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalkan keuntungan dunia tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat.

Untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat, system ekonomi Islam menyediakan beberapa landasan teoritis sebagai berikut:

1. Keadilan ekonomi (*Al-'Adalah Al-Iqtisādiyah*)
2. Jaminan social (*At-Takāful Al-Ijtimā'i*)
3. Pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi produktif secara efisien.

(□)

*Artinya: “berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.*⁵

B. Tujuan-Tujuan Produksi⁶

Tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup manusia, sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah.

Menurut M.N. Sidiqi dalam perusahaan ekonomi dalam Islam menegaskan beberapa tujuan badan usaha dalam Islam yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu secara wajar
2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan keluarga.
3. Bakal untuk generasi mendatang
4. Bakal untuk anak cucu
5. Bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah.

Tujuan produksi dapat dibagi dalam dua tujuan utama, yaitu :

1. Kebutuhan primer tiap individu

Setiap muslim diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer dapat

⁵ Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalannya Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 2006) h. 106.

⁶ Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta : Megistra Insania Press) h. 27-33.

1. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya, karena sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya.
2. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qardhawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penahanan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Qur'an dan hadis.
3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia seperti sabda nabi: "kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian".
4. Dalam berinovasi dan bereksperimen . pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat. Sesungguhnya Islam menyuruh bekerja dan berbuat, bersikap hati-hati dan melaksanakan selama persyaratan. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah SWT sebagai pemilik hak prerogatif yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dan persyaratan dipenuhi dengan optimal.

Prinsip di atas merupakan prinsip produksi secara umum. Ekonomi Islam yang bernuansa global bisa mencakup sebagian besar dari prinsip-prinsip yang ada, lebih dari itu ada pula pendapat sebagian pakar yang merinci prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam, antara lain:

:

Artinya: *“Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ra.: Nabi SAW. melarang keras kaum wanita menyambung rambutnya dengan apapun.”*¹²

Pada dasarnya rambut manusia itu harus dimuliakan karena merupakan salah satu ciptaan Allah yang diberikan pada manusia sebagai penyempurna penampilan. Beliau memisalkan kemuliaan rambut tersebut dengan hukum yang menyatakan bahwa seorang wanita yang sedang haid jika rambut wanita itu rontok maka harus disimpan sampai suci dari haid tersebut.

Kata beliau “rambutkan ciptaan Allah maka harus dimuliakan betul kan!, yaa... seperti kalo cewek dating bulan terus rambutnya rontok itukan sebaiknya harus disimpan, g’ boleh sebenarnya dibuang itu”.

Tentang permasalahan hukum memproduksi rambut palsu, beliau berpendapat berbeda tentang hukum Islam yang menyangkut produksi rambut palsu. Beliau berpendapat memproduksi rambut palsu itu boleh (mubah), tidak ada masalah tentang produksi rambut palsu selama tidak keluar dari ketetapan yang telah diberikan oleh agama.

Seperti kata beliau “ kalo tentang memproduksi rambut ya tidak apa-apa, itukan tidak melanggar ajaran Islam”.

¹² A1-Hafizh Zaki al-Din ‘Abd al-Azhim al-Mundziri, *Ringkasan Shahib Muslim* (Bandung: Mizan, 2002) h. 782.

Pemakaian rambut palsu merupakan penipuan karena merubah ciptaan Allah dan tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Untuk itu maka haram hukumnya kecuali pita atau jepit yang terdapat hiasan dari rambut maka tidak ada masalah selama tidak merubah ciptaan Allah.

Beliau berkata “ begini mbak ya..... hukum Islam itu sudah jelas menyebutkan kalo memakai rambut palsu itu haram karena ada unsur penipuannya, artinya orang itu tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kalo pita, selama tidak merubah ya... tidak apa-apa.”

Sedangkan memproduksi rambut palsu menurut Bapak Husen mempunyai pendapat berbeda tentang produksi tersebut. Beliau menganggap haram atau tidak boleh jika dalam produksi tersebut menggunakan rambut asli manusia dan dalam pemanfaatannya digunakan untuk kemaksiatan.

Larangan tentang haramnya produksi rambut menurut beliau dikarenakan adanya anggota tubuh manusia yang digunakan, karena mengambil salah satu bagian tubuh manusia untuk dipakai, dalam agama hal itu tidak diperbolehkan. Sedangkan tidak boleh karena pemanfaatannya, beliau menganggap bahwa rambut palsu digunakan oleh orang lain hanya untuk kemaksiatan pada yang memakainya.

Kata beliau “Sebenarnya memproduksi rambut palsu itu haram karena pembutan tersebut berasal dari manusia, mengambil ginjal orang itu tidak

adanya produksi rambut palsu. Mereka tidak membolehkan. Karena hukum tentang pemakaian rambut palsu yang dilarang dalam hukum syari'at Islam (fiqih Islam).

Adanya larangan tentang pemakaian rambut palsu tersebut. Membuat produksi rambut palsu juga dilarang dalam hukum Islamnya. Pendapat tersebut mengacu pada hukum tentang minuman khomer yang pada dasarnya sudah dilarang oleh agama maka pembuatannya juga dilarang karena pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran fiqih islam.

Sedangkan menurut pendapat H. Husein Hasyim tidak diperbolehkannya memproduksi rambut palsu dilihat dari pemanfaatan atas barang yang diproduksi tersebut. Pemanfaatan atas rambut palsu tersebut kebanyakan hanya untuk memamerkan aurat bagi perempuan sehingga adanya unsur maksiat dalam pemakaiannya.

Juga dilihat dari bahan baku yang dipakai dalam pembuatan rambut palsu yang menggunakan bahan baku dalam pembuatan rambut palsu tersebut menggunakan rambut asli dari manusia, artinya bahan baku yang dipakai memanfaatkan salah satu anggota tubuh manusia yang telah jelas dilarang dalam agama.

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh oleh H. M. Ishomuddin yang menganggap bahwa tidak bolehnya memproduksi rambut dikarenakan pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Beliau menganggap

rambut palsu tersebut untuk memamerkan aurat pada wanita, sedangkan dalam agama Islam wanita dilarang memamerkan auratnya kecuali telapak tangan dan wajah.

Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa pemanfaatan atas rambur palsu tersebut harus tepat sasaran atau dapat disimpulkan bahwa keterbatasan atas produksi rambur palsu tersebut hanya untuk kalangan yang memang boleh memakainya.

Dari para pendapat tokoh-tokoh NU di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat dari H. Abd Hafid dan H. Jazuli sepaham dengan pendapat madzab Maliki dan Hanbali yang melarang keras tentang menyambung rambur dari ke 2 pendapat madzhab tersebut H. Abd Hafid dan H. Jazuli melarang juga produksi rambur palsu.

Mereka melarang produksi rambur dikarenakan memproduksi rambur tersebut bisa menjadi salah sasaran sehingga tidak sesuai dengan fungsi pemakaiannya untuk itu sebaiknya tidak dilakukan sama sekali. Terutama dalam pemakaian rambur palsu tersebut terdapat unsur penipuan yang dilarang dalam agama.

Berbeda dari pendapat tokoh NU di atas, Bapak H. Abd Qohar menyimpulkan hukum memproduksi rambur palsu dilihat dari bidang ekonomi Islam terutama bidang produksi dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, tidak ada larangan dalam produksi rambur palsu tersebut selama mengikuti

kita ketahui tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk yang dapat mengetahui macam niat orang yang berbuat.

Dari pemaparan di atas maka penulis dapat memberikan analisis yaitu dalam hukum memproduksi rambut palsu tersebut dibolehkan karena dalam memproduksi tidak keluar dari syarat-syarat produksi dalam Islam jadi boleh saja karena dalam hal tersebut terdapat banyak unsur saling membutuhkan dan meringankan beban orang lain. Namun dari segi hukum syari'at Islamnya masih samar-samar karena adanya pemanfaatan yang berbeda dalam pemakaiannya.

Kaidah tentang niat ini lebih jelas dari kaidah yang pertama, karena penjelasan tentang pemakaian atas barang tersebut lebih disinggung pada kaidah ini. Pemakain atas suatu barang yang diproduksi itu berbeda, tergantung pada siapa yang menggunakannya, karena itu kaidah tentang niat ini menurut penulis lebih bisa menjelaskan hokum tentang memproduksi rambut palsu.

Dari kaidah yang kedua jika diambil kesimpulan maka memproduksi rambut palsu tersebut dalam hukum Islam itu dibolehkan karena niat awal atas produksi rambut tersebut untuk tujuan membantu orang lain dalam perekonomian, sehingga niat yang dipakai adalah niat dari produsennya bukan dari niat konsumen yang memakai rambut palsu tersebut.

Sehingga dalam memproduksi rambut palsu dianalisis dari hukum Islam maka dibolehkan dengan penerapan bahwa niat untuk memproduksi tersebut hanya untuk saling membantu pada orang lain. Artinya niat bukan dari

konsumen tapi dilihat dari produksinya. Dengan kata lain hukum yang diambil dalam kebolehan atas memproduksi rambut palsu tersebut bukan dari pemakaiannya tetapi dari ilmu ekonominya.

Pemakaian yang tidak tepat sasaran, dikarenakan perubahan zaman yang makin modern dan makin maju yang membuat rambut palsu merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan dan tuntutan untuk pemakaiannya. Permasalahan atas hal tersebut karena masyarakat Muslim masih belum sepenuhnya faham atas ajaran agama Islam.

Karena itu kebolehan atas memproduksi rambut palsu itu dilihat dari tujuan yang dicapai oleh produsennya. Adanya hukum tentang pelarangan rambut palsu itu bukan menjadi landasan hukumnya sehingga tidak terpengaruh produksinya.

